

Mengemudi Jalan Politik yang Terjal-Berliku :

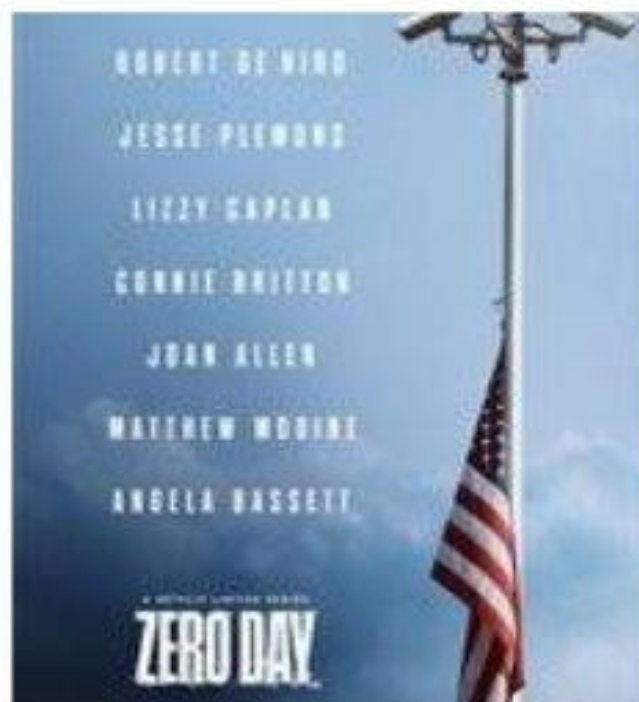
BELAJAR DARI SERIAL NETFLIX 'ZERO DAY'

By: Irfan Abubakar



Lantas, pelajaran apa yang Zero Day bisa berikan untuk memahami dinamika politik Indonesia?

Baru saja keluar dari Oven, 20 Pebruari ini Netflix menggebrak penggemarnya dengan meluncurkan film serial berjudul Zero Day. Serial pendek ini menampilkan sebuah film thriller politik mencekam yang bercerita bagaimana mantan presiden AS, George Mullen, diperankan oleh aktor kawakan Robert Di Nero, mengemudi jalan politik yang terjal-berliku saat ia diminta oleh Presiden Evelyn Mitchell (Angela Bassett), untuk menangani krisis nasional akibat serangan siber yang sekonyong-konyong melukai Amerika. Lantas, pelajaran apa yang Zero Day bisa berikan untuk kita memahami dinamika politik Indonesia belakangan ini?



Mengemudi Jalan Politik yang Terjal-Berliku:

Belajar dari Serial Netflix “Zero Day”

By Irfan Abubakar

Mukaddimah

Baru saja keluar dari Oven, 20 Pebruari ini Netflix menggebrak penggemarnya dengan meluncurkan film serial berjudul *Zero Day*. Serial pendek ini menampilkan sebuah film thriller politik mencekam yang bercerita bagaimana mantan presiden AS, George Mullen, diperankan oleh aktor kawakan Robert Di Nero, mengemudi jalan politik yang terjal-berliku saat ia diminta oleh Presiden Evelyn Mitchell (Angela Bassett), untuk menangani krisis nasional akibat serangan siber yang sekonyong-konyong melukai Amerika. Lantas, pelajaran apa yang *Zero Day* bisa berikan untuk kita memahami dinamika politik Indonesia belakangan ini?

Zero Day menyoroti ketegangan yang harus diatasi oleh pemimpin politik dalam menyeimbangkan antara keamanan publik dan kebebasan sipil, antara mengejar pertaruhan pribadi dan melindungi kepentingan keluarga, dan antara mempertahankan ambisi kekuasaan dan mengungkap kebenaran. Di luar prediksi, dalam salah satu segmen, alih-alih mengambil keputusan secara hitam-putih, sang tokoh, mantan Presiden AS, malah memilih bersikap pragmatis. Sikapnya mengajak kita merenungkan dengan jujur mengenai “kebenaran” dalam politik. Apakah kita harus menyembunyikan kebenaran demi keluarga atau ambisi kekuasaan, atau kita biarkan kebenaran membuka dirinya sendiri demi tegaknya kemaslahatan umum.

Narasi dalam film ini, kalau dipikir-pikir, cocok sekali dengan landscape politik nasional kita di Indonesia saat ini. Drama politik di tanah air hari ini mempertontonkan bagaimana para elit politik kita berselancar di atas ombak politik yang menantang adrenalin. Tapi sekaligus mematkan, kalau peselancarnya tidak punya kebijaksanaan, kehati-hatian, dan integritas.

Berkaca dari serial *Zero Day* apa yang bisa para elit kita pelajari dalam melewati labirin politik agar terhindar dari jebakan maut kebuntuan dan ketidapastian? Film ini mengajak kita membuka kembali lembaran politik dunia klasik, yang bercerita bagaimana para pemimpin kelas dunia menjalankan politik. Otto von Bismarck (wafat 1898), seorang Kanselir Jerman pertama, dalam sebuah kesempatan mengatakan “Politik adalah Seni Kemungkinan.” Kata-kata itu cerminan pengalamannya. Terbukti dengan menjalankan politik sebagai seni kemungkinan, Otto von Bismarck berhasil menyatukan Jerman pasca perang, membangun stabilitas Eropa dengan strategi aliansi, dan mengarsiteki kebijakan kesejahteraan di Jerman. Sejarah mencatat Otto van Bismarck berhasil meletakkan fondasi yang kokoh untuk arsitektur Jerman Modern.

Tapi bagaimana seorang tokoh politik menerapkan pragmatisme politik ketika dihadapkan pada berbagai dilema politik yang memaksanya berselancar. Akankan dia memilih mengorbankan kebenaran sejati demi kepentingan sementara, atau mengorbankan kepentingan sementara demi tegaknya kebenaran sejati?

Zero Day dan Dilema Politik

Salah satu tema sentral *Zero Day* adalah bagaimana para pemimpin politik harus mengelola krisis ketika kebenaran dan keamanan bertentangan. Mantan presiden dalam serial ini ditugaskan negara untuk menjadi ketua Komisi *Zero Day* yang bertugas mengungkap dalang di balik serangan siber dahsyat yang mengancam stabilitas nasional. Awalnya, ia bersedia mengkompromikan kebenaran dalam pertemuan rahasia dengan Ketua DPR, Richard Dreyer, (Matthew Modine), demi melindungi putri satu-satunya, Alex (Lizzy Caplan), yang setelah ditelusuri mendukung sang Ketua Dewan dalam konspirasi serangan siber *Zero Day*.

Di tengah *deadline* yang sangat ketat dan cemoohan *influencer* Medsos yang bertubi-tubi menyerangnya, George Mullen, selaku Ketua Komisi, berhasil mengungkap dan menahan salah seorang dalang di balik penyerangan, yaitu seorang miliarder teknologi bernama Monica Kidder (Gaby Hoffmann). Akan tetapi, belum sempat diinterogasi, Monica ditemukan mati di tahanan dengan menggantung diri. Awalnya, sang Ketua Komisi tampak ingin berkompromi dengan Ketua DPR. Dia sudah mencetak laporan yang siap dipresentasikan di depan Sidang Parlemen yang intinya menyimpulkan bahwa dalang penyerangan telah ditemukan, yaitu Monica. Karena Monica telah mati, maka sebaiknya penyelidikan kasus ditutup dan publik dihibau untuk sama-sama menatap masa depan.

Namun, di detik-detik terakhir, ketika membacakan laporan di atas podium, di hadapan ratusan peserta sidang Parlemen dan jutaan pasangan mata pemirsa TV, dia berubah pikiran dan memilih untuk mengungkap kebenaran seutuhnya setelah menerima pesan dari Alex. Dalam pesannya, Alex mengungkapkan penyesalannya dan bersedia bertanggung jawab atas tindakannya dan mendorong ayahnya untuk berpegang teguh pada prinsipnya. Tergerak oleh keberanian putrinya, dia meninggalkan upaya menutup-nutupi dan tanpa tedeng aling-aling mengungkapkan kenyataan di balik serangan tersebut, meskipun harus menghadapi resiko kehilangan putrinya dan juga potensi perlawanan politik.

Jujur dilema politik seperti ini sering kita jumpai dalam kenyataan, di mana para pemimpin politik sering kali bertindak dalam nuansa abu-abu, membuat pilihan sulit antara stabilitas umum dan absolutisme moral. Dalam salah satu adegan, sang mantan presiden mengakui, "Ini bukan tentang apa yang benar di dunia ideal, ini tentang apa yang membuat negara ini tidak terbakar." Kita menemukan contoh ini di dunia politik yang nyata di mana para pemimpin harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan yang bersaing dan menyadari bahwa transparansi mutlak atau idealisme yang kaku terkadang lebih banyak merugikan daripada membawa manfaat. Tapi apakah itu berarti pemimpin harus meninggalkan kebenaran sama sekali?

Zero Day dengan apik menghadirkan kepada kita sebuah ketegangan menarik antara pragmatisme dan idealisme. Pada awalnya, kesediaan Mantan Presiden Mullen untuk bernegosiasi dan berkompromi dengan Richard Dreyer menunjukkan dia seorang pragmatis yang lebih mengutamakan stabilitas politik dan kepentingan keluarga dibandingkan komitmen tanpa kompromi terhadap kebenaran.

Namun, keputusan akhirnya untuk mengungkap kebenaran setelah Alex siap mempertanggungjawabkan perbuatannya menunjukkan bahwa dia tidak sepenuhnya pragmatis.

Dengan memilih untuk mengungkap konspirasi tersebut meskipun dengan segala resiko menunjukkan bahwa dia idealis yang berpihak kepada keadilan dan akuntabilitas. Meski begitu, tidak berarti dia menolak pragmatisme politik sama sekali. Pasalnya, seorang pemimpin pragmatis tidak lantas harus menghindari kebenaran, tetapi terlebih dahulu akan menimbang-nimbang setiap konsekuensi dari tindakannya. Sikap Mantan Presiden Mollen mengajarkan kepada kita bahwa kepemimpinan sejati memerlukan keseimbangan antara pragmatisme dengan momen-momen tekad idealis ketika pertarungan menuntutnya.

Meneropong Paralelisme dengan Dinamika Politik Indonesia

Arena politik Indonesia telah lama dibentuk oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan kekuasaan, persepsi publik, dan pemerintahan. Dilema politik dalam *Zero Day* mengingatkan kita pada situasi di mana para pemimpin Indonesia harus menghadapi krisis nasional. Misalnya, pada masa Reformasi tahun 1998, Presiden B.J. Habibie menghadapi tekanan yang sangat besar untuk mengungkap seluruh pelanggaran hak asasi manusia selama masa pemerintahan Soeharto.

Meski Presiden Habibie tidak menampik adanya pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu, sebagai Presiden Indonesia kala itu Habibie memprioritaskan stabilitas politik, dengan cara menghindari tindakan ekstrem yang dapat menyebabkan kekacauan lebih lanjut. Tapi, di sisi lain, dia mengambil keputusan yang berani untuk memberikan referendum kepada rakyat Timor-Timur (sekarang Timor Leste) untuk memilih berpisah atau tetap menjadi bagian dari Indonesia. Hasilnya kita tahu semua, referendum yang diadakan pada 30 Agustus 1999 itu memutuskan rakyat Timor Timur memilih berpisah. Pengamat dari Australia, Marcus Mietzner, baru-baru ini mengapresiasi jasa Presiden Habibie dalam pelebagaan demokrasi di Indonesia, meskipun juga menilainya kurang sukses dalam karier politiknya.

Negosiasi antara kemanan nasional dan kebebasan berekspresi juga dapat dilihat pada kebijakan kontraterorisme di Indonesia. Tahun 2017, Presiden Jokowi membuat keputusan tegas membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang dianggap merepresentasikan radikalisme politik. Sejumlah aktivis HAM mengeritik kebijakan ini karena dianggap dapat menjadi *pretext* bagi pelemahan kebebasan sipil dan kontrol berlebihan pemerintah terhadap hak-hak sipil. Dilema yang sama juga dapat dilihat di *Zero Day*. Ketika Eks Presiden Mullen mengumumkan hasil investigasi bahwa bukan agen Rusia yang berada di balik serang siber, tapi justru kelompok ekstremis dalam negeri, maka Evan Green (Dan Setevens), seorang influencer di Medsos, menghujatnya habis-habisan. Evan menilai kesimpulan Geroge Mullen dapat mematikan demokrasi di Amerika, dan setiap orang sewaktu-waktu terancam ditangkap, termasuk dirinya. Pada akhirnya, Presiden Mullen tetap melakukan penangkapan terhadap kelompok yang dituduh terlibat konspirasi, dan bahkan Evan Green sendiri pun ditangkap dan diinterogasi karena hasil investigasi mengindikasikan keterlibatannya dalam konspirasi.

“Seni Kemungkinan” dalam Politik

Zero Day menegaskan kembali bahwa politik yang sukses bukanlah tentang menegakkan ideologi yang kaku, namun tentang mengelola kepentingan yang bersaing dengan kompromi

strategis. Inilah yang digambarkan oleh filsuf Max Weber sebagai "etika tanggung jawab"—sebuah ide yang menekankan bahwa pemimpin politik harus membuat pilihan sulit berdasarkan konsekuensi, bukan sekadar atas dasar kata-kata idealistik.

Di Indonesia, prinsip ini sudah terlihat pada kepemimpinan masa lalu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), misalnya, kerap dikritik karena terlalu berhati-hati dan bimbang. Namun, kemampuannya untuk menyeimbangkan faksi politik, menghindari konfrontasi langsung, dan menjaga stabilitas selama satu dekade kekuasaannya mencerminkan pendekatan pragmatis.

Hal serupa juga ditampilkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang harus memilih antara mempertahankan daya tarik populisnya dan membuat aliansi politik pragmatis. Keputusan kontroversial Jokowi menarik mantan rivalnya, Prabowo Subianto, ke dalam kabinet Indonesia Maju, salah satu contoh nyata bagaimana pragmatisme politik dijalankan. Bagaimanapun, Jokowi menyadari keputusannya ini mengecewakan bagi sebagian pendukungnya. Namun, dia sadar harus melakukan negosiasi politik semacam itu karena kalau tidak, ada resiko yang mengintai: akan semakin dalam polarisasi politik yang mengusung identitas agama dan tentu saja pemerintahannya akan terus-menerus dirongrong.

Dalam pendekatan pragmatis, keputusan pemimpin politik harus merupakan langkah strategis menyeimbangkan kepentingan yang bersaing, bukan sekadar sikap emosional atau ideologis. Presiden Mollen dalam *Zero Day* pada akhirnya memilih jalan yang mencoba menyeimbangkan antara stabilitas publik dan kepentingan pribadi. Kalau kita bandingkan ini dengan instruksi Megawati kepada kepala daerah dari PDIP untuk tidak mendukung Program Retret (*Retreat*) Pemerintahan Prabowo, Ibu Mega tampak lebih menekankan disiplin partai ketimbang persatuan nasional yang lebih luas dan efektivitas pemerintahan.

Dari sudut pandang pragmatis, mungkin alternatifnya bisa dengan tetap mengizinkan partisipasi mereka di Program Retret sambil mempertahankan sikap politik yang berbeda. Dengan begitu, Ibu Megawati akan menampilkan sikap yang berimbang: menunjukkan komitmen PDIP terhadap pemerintahan sambil sekaligus menunjukkan independensinya. Sebaliknya, dengan memilih untuk melakukan boikot langsung, keuntungannya di satu sisi dapat memperkuat kohesi internal partai, namun di sisi lain beresiko polarisasi politik lebih lanjut dan kehilangan kesempatan untuk berinteraksi dengan pemerintah secara konstruktif.

Sikap yang murni konfrontatif dalam politik sering kali mempunyai konsekuensi jangka panjang. Menolak untuk terlibat dalam Retret mengirimkan pesan perlawanan yang kuat. Namun hal ini juga berisiko mengisolasi PDIP dari proses pengambilan keputusan koalisi pemerintahan. Seiring berjalannya waktu, hal ini dapat menyebabkan berkurangnya pengaruh politik, berkurangnya peluang bagi tokoh PDIP untuk memegang peran penting dalam pemerintahan, dan kemungkinan terjadinya fragmentasi internal karena beberapa anggota PDIP mungkin memilih keterlibatan yang lebih strategis dengan pemerintah.

Tanpa "Seni Kemungkinan", kekakuan politik dapat menyebabkan krisis. Jatuhnya beberapa tokoh politik di banyak negara termasuk Indonesia antara lain karena gagal mengelola dinamika kekuasaan. Hal ini mengajak kita merenungkan resiko apa yang akan dihadapi apabila para pemimpin mengabaikan perlunya kompromi strategis.

Pelajaran Apa yang dapat dipetik dari *Zero Day*?

Zero Day lebih dari sekadar film thriller politik. Serial ini menawarkan renungan mengenai kompleksitas pemerintahan dan politik di dunia nyata. Dalam serial ini tokoh pemimpin politik menyeimbangkan kebenaran, keamanan, dan kontestasi kekuasaan dengan cara yang tidak *hantam kromo*. Meskipun pragmatisme diperlukan untuk mengatasi krisis politik, serial ini juga menggarisbawahi bahwa kepemimpinan yang efektif memerlukan komitmen terhadap kebenaran, keadilan, dan akuntabilitas. Para pemimpin yang memprioritaskan stabilitas jangka pendek dengan mengorbankan nilai-nilai ideal berisiko mengikis kepercayaan publik dan pada akhirnya melemahkan institusi demokrasi yang ingin dilindungi.

Elit politik kita pun demikian seharusnya. Mereka perlu menganut pragmatisme untuk mengatasi konflik antara keamanan publik, stabilitas nasional, dan dinamika kekuasaan kelompok & pribadi. Namun, kepemimpinan politik yang sejati tidak berarti mengkompromikan prinsip-prinsip fundamental demi kepentingan sesaat. Tantangannya terletak pada menemukan solusi yang menjaga stabilitas sekaligus menegakkan keadilan dan akuntabilitas publik.

Zero Day mengingatkan kita bahwa meskipun pemerintahan seringkali menuntut negosiasi dan kompromi, legitimasi keputusan politik apa pun bergantung pada keselarasan keputusan tersebut dengan tanggung jawab etis dan kepentingan publik yang lebih besar. Di era dimana polarisasi ideologi semakin meningkat, masa depan politik Indonesia bergantung pada para pemimpin yang mampu, seperti mantan presiden di *Zero Day*, mengatasi kompleksitas tanpa mengorbankan nilai-nilai inti bangsa.

Pertanyaannya, dapatkah elit politik Indonesia menguasai “Seni Kemungkinan” sebelum krisis berikutnya datang menerpa kita?